

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa serta penelitian di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja politisi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin Tahun 2014-2016 dinilai sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari:

1. Pelaksanaan peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi dilihat dari indikator responsivitas dinilai sudah baik. Hal tersebut dibuktikan dengan berhasil disepakatinya 2 (dua) Perda yang berkaitan dengan gender, dan anak. Meskipun setelah berhasil disahkannya kedua Perda tersebut, wewenang yang dimiliki politisi perempuan hanya untuk mengawasi proses jalannya Perda, tetapi politisi perempuan yang tergabung dalam badan legislasi daerah DPRD Kota Banjarmasin, dinilai mampu mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan. Sedangkan dilihat dari indikator akuntabilitas, politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi sudah sesuai dengan aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, selain itu politisi perempuan dinilai sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Serta dilihat dari indikator efektivitas, dinilai sudah baik atau telah efektif, dengan adanya politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin dinilai dapat menjadi penyambung aspirasi masyarakat terutama kaum perempuan.

2. Pelaksanaan peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi anggaran dilihat dari indikator responsivitas, politisi perempuan berhasil menetapkan besaran anggaran untuk mendukung program-program peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak, serta memberikan kepercayaan kepada SKPD untuk mengelola anggaran tersebut. Meskipun secara kuantitatif politisi perempuan yang tergabung dalam badan anggaran daerah DPRD Kota Banjarmasin sangat minim, tetapi secara kualitas mereka dinilai mampu untuk mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan anggaran. Sementara itu, peran politisi perempuan dalam menjalankan fungsi anggaran dilihat dari indikator akuntabilitas dinilai sudah akuntabel, hal itu dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi anggaran sudah sesuai dengan mekanisme dan sesuai dengan aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu, setiap tahunnya DPRD Kota Banjarmasin membuat laporan realisasi anggaran sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Politisi perempuan bersama-sama memperjuangkan hal yang berkaitan dengan masalah perempuan dan anak di Kota Banjarmasin. Sehingga dapat menjadi sebuah kebijakan dan mendorong dalam segi anggaran. Berikutnya, kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi anggaran dilihat dari indikator efektivitas dinilai sudah baik atau telah efektif, dengan adanya politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin dapat menjadi penyambung aspirasi masyarakat terutama kaum perempuan.

3. Pelaksanaan peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dilihat dari indikator responsivitas, dinilai sudah baik. Politisi perempuan aktif dan mampu dalam melaksanakan fungsi pengawasan, diantaranya melakukan pengawasan terhadap pihak eksekutif, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta melaksanakan pengawasan APBD oleh SKPD secara langsung. Berikutnya, kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dilihat dari indikator akuntabilitas dinilai sudah akuntabel. Hal tersebut dilihat dari besarnya peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan di Kota Banjarmasin. Terakhir, kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dilihat dari indikator efektivitas dinilai sudah baik atau telah efektif, dengan adanya peran politisi perempuan dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pemerintahan dan pembangunan, serta efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan di Kota Banjarmasin,

B. Saran

Saran yang disampaikan oleh penulis berisi tentang masukan-masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja politisi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin, antara lain:

1. Partai politik harus benar-benar menyiapkan kader-kadernya khususnya kader perempuan, sehingga saat mereka terpilih dan duduk di legislatif mereka bisa menjadi politikus yang handal, dan menjadi aspiratif bagi masyarakat.

2. Politisi perempuan hendaknya memanfaatkan kegiatan BIMTEK dengan baik dan maksimal, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan peningkatan kinerja di legislatif.
3. Politisi perempuan sebaiknya lebih aktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat sehingga dalam proses pembentukan Perda, akan ada banyak Perda yang berhasil ditetapkan untuk kesejahteraan kaum perempuan dan anak, khususnya di Kota Banjarmasin.